

REAKSI

01.01.2022

DITERIMA

Januari 2022

DIREVISI

Januari 2022
Februari 2022
Maret 2022

DISETUJUI

Maret 2022

ANALISIS IMPLEMENTASI KRITERIA ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD PADA PT. LIPPO KARAWACI, TBK.

Arden Ashido Gabe PanangianProgram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya,
Indonesia**Made Sudarma**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: This research aims to analyze the ASEAN Corporate Governance Scorecard criteria implemented by PT. Lippo Karawaci, Tbk. This research employs a qualitative descriptive method utilizing content analysis documents. The data are collected and analyzed through the ASEAN Corporate Governance Scorecard calculating the total score based on predetermined quality. The result of this research indicates that the level 1 ASEAN Corporate Governance Scorecard implementation by PT. Lippo Karawaci, Tbk. acquires a total score of 72.2 with a trusted category.

Keywords: *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, PT. Lippo Karawaci, Tbk., *Good Corporate Governance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kriteria yang telah ditentukan dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard* pada PT. Lippo Karawaci, Tbk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah kajian isi dokumen (*content analysis document*). Prosedur analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan sumber data, analisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dan menghitung nilai akhir berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* level 1 yang telah dilakukan oleh perusahaan mendapatkan nilai akhir 72,2 dengan predikat terpercaya.

Kata kunci: *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, PT. Lippo Karawaci, Tbk., *Good Corporate Governance*

INDEKSASI

Google Scholar

PENULIS KORESPONDENSI

Arden Ashido Gabe Panangian

arden.panangian@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Brawijaya, Indonesia

PENDAHULUAN

Teknologi informasi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia pada zaman sekarang di seluruh dunia. Hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia ditunjang oleh keberadaan alat-alat berbasis teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi juga terjadi di Indonesia. Saat ini, Indonesia tengah berupaya mengembangkan infrastrukturnya agar sanggup untuk berkompetisi dengan negara-negara lain dalam bidang kemajuan teknologi informasi.

Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (2020) mengenai perkembangan penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia tahun 2016-2019, menunjukkan hasil bahwa penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, yaitu telepon seluler, internet, *mobile broadband* dan *fixed-broadband* mengalami kecenderungan positif hingga tahun 2019, meskipun untuk infrastruktur telepon seluler dan *mobile broadband* mengalami penurunan angka sebanyak satu kali pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi semakin umum digunakan oleh masyarakat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Kemudahan akses dalam menggunakan infrastruktur teknologi informasi berdampak pada banyaknya sektor yang bertransformasi menyesuaikan dengan perubahan dan kemajuan yang ada. Salah satu sektor yang terdampak karena adanya perkembangan teknologi informasi yaitu investasi. Saat ini, investasi menjadi salah satu kegiatan yang sedang ramai dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu sektor investasi yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah dalam sektor pasar modal. Menurut data yang dipaparkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (2021), masyarakat Indonesia yang terdaftar sebagai investor dalam sektor pasar modal sudah mencapai angka 6.100.525 orang per Agustus 2021. Jumlah tersebut meningkat sebesar 57,20% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebelum investor menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan terbuka, investor melakukan analisis terhadap kondisi

perusahaan guna menambah keyakinan atas keputusan dalam menginvestasikan modalnya pada perusahaan tersebut. Teknik analisis saham yang umum dipergunakan oleh investor adalah analisis fundamental. Analisis fundamental adalah salah satu cara menganalisis saham yang sering digunakan oleh investor, dengan didasarkan pada nilai intrinsik suatu perusahaan (Natarsyah, 2000). Nilai intrinsik saham adalah suatu nilai yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang diperhitungkan berdasarkan kondisi perusahaan tersebut secara keseluruhan di masa mendatang (Kartikasari, 2013). Beberapa komponen yang umumnya digunakan sebagai dasar dalam menghitung nilai intrinsik suatu saham adalah kinerja manajemen, produk, pertumbuhan pendapatan dan hal lain yang memiliki keterkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan (Kartikasari, 2013). Komponen dalam nilai intrinsik ini sangat berkaitan dengan bagaimana cara manajemen dalam melaksanakan tata kelola perusahaannya (*corporate governance*).

Corporate governance (CG) mulai ramai diperbincangkan di Indonesia sejak peristiwa krisis finansial yang dahulu telah terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998 (Faisal, 2008). Salah satu sektor usaha yang sangat terdampak dengan adanya krisis finansial adalah sektor usaha perbankan (Faisal, 2008). Pada tahun yang sama, banyak bank yang mengalami penurunan likuiditas, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban akibat terjadinya inflasi, dan berdampak pada munculnya anggapan masyarakat bahwa manajemen perusahaan tidak profesional dalam mengelola perusahaannya karena tidak dapat menyelesaikan kewajiban yang ada (Tarigan, 2016).

Kasus yang merepresentasikan lemahnya tata kelola perusahaan dalam lingkup global adalah peristiwa yang pernah dilakukan oleh perusahaan terbuka asal Amerika Serikat, yaitu Enron (Tarigan, 2016). Deil (2014) mengungkapkan bahwa Enron pernah menjadi perusahaan ketujuh terbesar di Amerika Serikat, dan bahkan menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di dunia, dengan jumlah karyawan mencapai 21.000 yang tersebar di empat puluh negara. Deil (2014) melanjutkan pendapatnya bahwa kasus yang dilakukan oleh pihak manajemen Enron adalah

dengan memanipulasi laba perusahaan mencapai US\$ 68.000.000 (kurs = Rp11.301/US\$) dan melakukan penyembunyian utang yang juga dibantu oleh Arthur Andersen, firma akuntan publik yang memiliki tugas dalam melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan Enron. Dampak dari manipulasi laba dengan angka yang besar ini menyebabkan investor terus menanamkan modalnya di Enron, sehingga harga per lembar saham Enron terus meningkat. Namun, skandal ini tidak bertahan lama. Pada awal tahun 2001, kasus Enron diungkap kepada masyarakat yang menyebabkan harga per lembar saham Enron turun secara drastis, sehingga, pada akhir 2001, Enron secara resmi dinyatakan bangkrut, dan kemudian diikuti dengan pencabutan izin Arthur Andersen secara global. Kasus Enron semakin menguatkan bahwa sangat diperlukan peraturan yang mengatur mengenai CG.

Beberapa peristiwa yang telah terjadi ini menjadi titik tolak diberlakukannya peraturan mengenai CG (Faisal, 2008). berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Nomor: KEP/31/M.EKUI/08/1999, Indonesia secara resmi membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Seiring berjalannya waktu, KNKCG kemudian diganti menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. Sebagai komite yang bergerak dalam bidang tata kelola, KNKG bertugas untuk menyusun dan menerbitkan pedoman *good corporate governance* (GCG) yang diberlakukan di Indonesia, agar proses tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan menjadi semakin lebih baik (Simanjuntak, 2019). Pedoman yang berhasil diterbitkan oleh KNKG melalui laman situs resminya antara lain: Pedoman Etika Bisnis Perusahaan, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran dan beberapa pedoman lainnya.

Rahmawati (2006) dalam bukunya mengenai Teori Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia menyatakan bahwa dalam memberlakukan aturan mengenai GCG, Indonesia juga mengadopsi beberapa pedoman

praktik tata kelola yang berstandar Internasional, yaitu pedoman yang telah disusun oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), yang bertujuan untuk mewujudkan suatu tata kelola perusahaan yang transparan, efisien dan dapat memisahkan tugas dan kewenangan antara regulator, pengawas dan penegak hukum.

Seiring berjalannya waktu, proses bisnis semakin berkembang, baik di dunia, ASEAN, maupun di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai dari tahun 2015. MEA sebagai salah satu bentuk kerja sama negara anggota ASEAN dalam bidang perekonomian, berkeinginan untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Abdi (2021) menyampaikan bahwa salah satu tujuan dibentuk MEA adalah agar negara-negara di ASEAN dapat semakin kompetitif secara global dalam lingkup perekonomian serta untuk meningkatkan investasi di lingkup negara-negara ASEAN, termasuk salah satunya adalah Indonesia.

Keadaan pasar modal yang semakin terbuka sangat memengaruhi keadaan investasi yang ada di ASEAN. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya MEA. Transparansi dan keterbukaan atas informasi suatu perusahaan menjadi sangat penting untuk menambah tingkat kepercayaan dari investor. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dapat menjadi suatu cara yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan GCG dan meningkatkan transparansi informasi. RSM Indonesia (2020), yang diwakili oleh Angela Simatupang selaku *Head of Consulting* menyatakan bahwa ACGS diberlakukan untuk menambah tingkat kepercayaan investor kepada perusahaan publik di kawasan ASEAN. Selain itu, tujuan lain dari penggunaan ACGS adalah agar kualitas tata kelola perusahaan terbuka di ASEAN semakin baik.

RSM Indonesia (2020) mengungkapkan bahwa sudah ada seratus perusahaan terbuka yang memiliki angka kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia dinilai dengan menggunakan ACGS untuk tahun buku 2018. Hasil penilaian ACGS untuk seratus perusahaan terbuka di Indonesia menghasilkan rata-rata nilai yang diperoleh Indonesia dalam kepatuhan terhadap penerapan ACGS adalah 70,80, dengan nilai

tertinggi sebesar 113,83 diraih oleh salah satu perusahaan terbuka perbankan, yaitu CIMB Niaga dan nilai terendah dari penilaian periode tersebut adalah 37,58, dengan tidak mengungkapkan lebih lanjut nama perusahaannya. RSM Indonesia (2020) juga menyatakan bahwa hasil penilaian ACGS periode 2019 mengalami peningkatan sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, terdapat sepuluh perusahaan publik asal Indonesia yang telah berhasil masuk dalam kategori Kelas Aset ASEAN, yang terdiri dari tujuh perusahaan sektor keuangan (*financials*), satu perusahaan sektor material (*materials*), satu perusahaan sektor utilitas (*utilities*) dan satu perusahaan sektor telekomunikasi (*telecommunications*).

Meskipun ada peningkatan nilai yang dialami oleh Indonesia, namun pemeringkatan ACGS ini berlaku untuk enam negara lainnya di kawasan ASEAN. *National University of Singapore Business School* (2021) merilis nilai rata-rata akhir atas penerapan kriteria ACGS dari masing-masing negara. Pada periode penilaian tahun 2019, Thailand berhasil memperoleh peringkat pertama dengan nilai 96,6, diikuti oleh Malaysia dengan nilai 94,99, Singapura dengan nilai 88,27, Filipina dengan nilai 77,24, Indonesia dengan 70,8 dan Vietnam dengan nilai 54,55. Peringkat yang diperoleh Indonesia konstan sejak tahun 2012, yaitu dengan terus berada di peringkat lima.

Selain itu, masalah yang terjadi adalah terdapat ketidakratahan atas penerapan ACGS antara setiap sektor perusahaan terbuka di Indonesia berdasarkan pada nilai akhir yang telah diperoleh masing-masing sektor. Ketimpangan ini terjadi pada setiap sektor usaha yang dinilai dengan selisih nilai yang cenderung banyak. RSM Indonesia (2020) menyatakan bahwa pada periode penilaian 2019, sektor yang memiliki nilai terendah di Indonesia adalah sektor barang konsumsi (*consumer goods*) dan properti (*property*) dengan rata-rata nilai dibawah 65. *Asian Development Bank/ADB* (2021) secara khusus mengungkapkan bahwa nilai yang diperoleh sektor properti di Indonesia untuk periode penilaian ACGS tahun 2019 adalah sebesar 64,62, serta mengalami penurunan dari periode penilaian ACGS tahun 2017 dengan nilai 65,92.

Fahriyah (2016) mengungkapkan bahwa sektor properti saat ini menjadi salah satu sektor usaha yang sedang sangat berkembang, khususnya di Indonesia, dengan pembuktian bahwa sektor usaha ini tidak terpengaruh dengan adanya krisis yang terjadi di Amerika maupun Eropa.

BEI (2019) melalui laporan berjudul *IDX Fact Book 2019* mengumumkan bahwa salah satu perusahaan properti dengan kapitalisasi pasar tertinggi pada kuartal satu dan dua tahun 2019 adalah PT. Lippo Karawaci, Tbk. Namun, baik dari BEI, OJK maupun RSM tidak mengumumkan secara rinci mengenai nilai akhir yang diperoleh oleh setiap perusahaan yang dinilai serta kelebihan dan kekurangan masing-masing perusahaan dalam menerapkan kriteria ACGS.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada bagian di atas, peneliti melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Implementasi Kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard pada PT. Lippo Karawaci, Tbk.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori Keagenan merupakan sebuah teori telah dikemukakan sejak tahun 1976 oleh Jensen dan Meckling. Jensen dan Meckling (dikutip oleh Putra, 2018, hal. 7) menyatakan bahwa teori keagenan adalah sebuah teori yang membahas tentang tata kelola perusahaan, terkhusus mengenai hubungan antara pihak yang memberi pekerjaan kepada orang lain atau pemilik suatu usaha (pihak prinsipal) dan pihak yang diberikan pekerjaan oleh pemilik usaha tersebut (pihak agen), dimana pihak prinsipal memberikan kewenangannya kepada pihak agen untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan usahanya. Dalam pelaksanaannya, pihak prinsipal memberikan perintah kepada pihak agen untuk dapat melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan kelangsungan operasional perusahaan dengan mengatasnamakan pihak prinsipal. Namun, pihak agen harus terus memberikan laporan secara berkala mengenai kinerja yang telah dilakukannya agar pihak prinsipal mengetahui kegiatan yang telah dilakukan pihak agen terkait dengan tata kelola perusahaannya, seperti aktivitas operasi dan aktivitas investasi, agar dapat menilai kinerja yang telah dilakukan

oleh pihak agen (Renny, 2017). Karina dan Weli (2020) berpendapat bahwa hubungan yang dilakukan antara pihak prinsipal dan pihak agen tidak selalu berjalan dengan baik. Beberapa contoh konflik yang terjadi antara pihak prinsipal dan agen adalah keputusan yang diambil oleh pihak agen tidak merepresentasikan kehendak pihak prinsipal dan ketidakseimbangan informasi.

Corporate Governance (CG)

Corporate Governance (CG) menurut *Cadbury Report* (dikutip dalam Modul *Chartered Accountant* (CA) tentang Etika Tata Kelola Korporat, 2015, hal. 80) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai metode yang bertujuan untuk dapat membantu mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi. *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) merupakan sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan standar suatu kebijakan agar lebih baik lagi dengan tujuan menghasilkan kebijakan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh pihak. Salah satu pedoman yang dirilis oleh OECD adalah mengenai *corporate governance*, dimana OECD mendefinisikannya sebagai hubungan antara *shareholders*, dewan komisaris, direksi, manajemen dan *stakeholders* perusahaan (Iba dan Bariah, 2013). Indonesia, melalui *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), juga mengartikan tata kelola sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah (regulator), pegawai perusahaan dan *stakeholders* perusahaan baik dari dalam maupun luar perusahaan tersebut yang memiliki hubungan untuk mengatur dan mengelola suatu perusahaan (Shaqila, 2021). Triwahyuningtias (dikutip dalam Shaqila, 2021, hal. 3) menyebutkan bahwa tujuan dari diterapkannya sistem *corporate governance* adalah untuk mengatur hubungan antar pihak yang terkait dalam suatu perusahaan serta untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam pengelolaan perusahaan dan menjamin bahwa kekeliruan yang dilakukan dapat diselesaikan dan tidak terjadi kembali.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*/KNKCG (dalam Negara, 2021, hal. 2) mengungkapkan bahwa GCG atau yang dikenal sebagai *good corporate governance* merupakan suatu pedoman yang dapat diaplikasikan oleh organisasi atau perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah terhadap perusahaan dalam jangka waktu yang panjang kepada pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan yang lain serta dengan tetap berpedoman kepada undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku.

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) merupakan suatu metode penilaian terhadap keterbukaan informasi perusahaan kepada masyarakat, serta menjadi tolak ukur praktik *good corporate governance* yang dikembangkan atas kerja sama antara *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF) dan *Asian Development Bank* (ADB) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas implementasi tata kelola pada perusahaan publik yang baik di kawasan ASEAN. ADB (2021) menyatakan bahwa terdapat dua *level* dalam melakukan penilaian berdasarkan kriteria ACGS, dengan tujuan untuk dapat merepresentasikan secara aktual praktik dari GCG perusahaan publik dari setiap negara. ADB (2021) menjabarkan bahwa *level* satu terdiri dari beberapa komponen penilaian yang didasarkan pada hukum, undang-undang, regulasi dan ekspektasi dasar prinsip tata kelola perusahaan menurut G20/OECD. Menurut RSM Indonesia (2020), terdapat lima bagian dalam kriteria *level* satu, antara lain:

TABEL 1. KOMPOSISI DAN STRUKTUR PENILAIAN LEVEL 1 (SATU) ACGS

Bagian	Jumlah Kriteria	Bobot (%)	Nilai Maksimum
A	21	10	10
B	15	10	10
C	13	15	15
D	32	25	25
E	65	40	40

Sumber: Asian Development Bank (2021)

Berikut adalah penjelasan masing-masing bagian:

- Bagian A: Hak pemegang saham
- Bagian B: Perlakuan yang adil kepada pemegang saham
- Bagian C: Peran pemangku kepentingan
- Bagian D: Pengungkapan dan transparansi
- Bagian E: Tanggung jawab anggota dewan perusahaan

Asian Development Bank (dalam Pahlevi, 2020) mengungkapkan bahwa ada tiga penggolongan predikat yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan nilai akhir yang diperoleh dalam prosedur penilaian ACGS, yaitu:

- Sangat Terpercaya : 85 sampai dengan 100
- Terpercaya : 70 sampai dengan 84,99
- Cukup Terpercaya : 55 sampai dengan 69,99

Perusahaan Publik Sektor Properti

Perseroan Publik Sektor Properti merupakan seluruh perseroan terbatas yang bergerak dalam sektor properti yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui penawaran umum dan telah memenuhi kriteria minimum mengenai modal disetor dan pemegang saham sebagaimana yang telah diregulasi dalam undang-undangan atau peraturan mengenai Perseroan Terbatas dan Pasar Modal. Wijaya dan Ananta (2017) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan properti ialah aset berupa bangunan atau tanah, serta sarana prasarana yang tidak dapat dipisahkan dari tanah atau bangunan tersebut. Menurut *Urban Land Institute* dan *PricewaterhouseCoopers* (dalam Wijaya dan

Ananta, 2017, hal. 5), terdapat lima jenis properti, antara lain adalah distribusi atau industrial, residensial atau perumahan, perkantoran, retail dan hotel.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Moelong (dalam Wicaksono, 2020, hal. 26), penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif, baik berupa kalimat secara lisan maupun tertulis, dari orang-orang dan hasil pengamatan perilaku. Selanjutnya, Semiawan (2010) menyatakan bahwa tujuan dari dilaksanakannya penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan arti yang bersifat mendalam (*verstehen*) atas suatu fenomena, kejadian, peristiwa atau masalah, serta bukan untuk membuktikan hubungan sebab dan akibat dari suatu kejadian. Pendekatan deskriptif menurut Hamta (2019) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk memusatkan perhatian pada suatu unit yang berasal dari banyaknya fenomena yang terjadi, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan secara mendalam.

Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian menurut Muljono (2002) menyatakan bahwa instrumen penelitian ialah suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam melakukan metode penelitian kualitatif, peneliti akan menjadi pihak yang berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian, dikarenakan peneliti yang sedang melakukan penelitian adalah satu-satunya pihak yang secara langsung mengumpulkan data serta melakukan prosedur penelitian yang telah dirancang sebelumnya (Putri, 2016). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti sendiri yang melakukan analisis data dalam penelitian ini.

Objek Penelitian

Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Lippo Karawaci, Tbk. Hal yang melandasi ditentukannya objek

penelitian ini adalah karena menurut RSM Indonesia (2020), salah satu sektor perusahaan yang menjadi objek penilaian ACGS periode 2019 dan mendapatkan nilai rata-rata terendah adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor properti. Tujuan dipilihnya perusahaan sektor properti yang terdaftar dalam BEI pada penelitian ini adalah guna mengetahui apakah sudah ada perbaikan atas tata kelola perusahaan tersebut saat ini.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Menurut Hamta (2019), berdasarkan cara memperolehnya, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang sedang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari studi atau penelitian sebelumnya maupun data yang dipublikasikan dari organisasi lain dan bersifat tidak langsung. Data primer yang digunakan adalah dokumen yang diperoleh secara langsung dari situs resmi perusahaan, seperti laporan tahunan, pemanggilan dan risalah RUPS, anggaran dasar perusahaan, piagam dewan, kode etik, serta dokumen lain yang terkait dengan indikator ACGS dan dapat diakses oleh publik dan sah, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari sumber lain, seperti dokumen dari jurnal, artikel, atau penelitian terdahulu.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah metode penelusuran data *online* dalam melaksanakan penelitian ini. Menurut Hamta (2019), metode pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan penelusuran data *online* ialah suatu cara untuk menelusuri data dengan menggunakan fasilitas jaringan internet guna mendapatkan informasi yang mendukung penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data terdiri dari empat tahap, antara lain:

1. Teknik Penggunaan Bahan Dokumen
Nilamsari (2014) menerangkan bahwa penggunaan bahan dokumen merupakan salah satu teknik analisis dokumen dengan menggunakan sumber non-manusia, seperti foto, dokumen maupun hasil

statistik, yang dianggap sebagai narasumber penelitian.

2. Teknik Kajian Isi Dokumen
Moleong (dikutip dalam Nilamsari, 2014, hal. 4) menyatakan bahwa kajian isi dokumen merupakan cara yang dipakai untuk menyimpulkan informasi yang didapatkan melalui karakteristik pesan, serta dilakukan secara sistematis dan objektif. Tujuan dari kajian isi dokumen menurut Berelson (dikutip dalam Nilamsari, 2014, hal. 4) adalah agar hasil penelitian berupa deskripsi dapat bersifat objektif dan sistematis.
3. Pembobotan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)
Dalam melaksanakan prosedur penelitian menggunakan teknik bahan dokumentasi dan kajian analisis dokumen, peneliti menggunakan alat bantu *scorecard* dan rumus perhitungan penilaian akhir yang telah ditentukan dan dipublikasikan secara resmi oleh ACMF dalam menilai GCG berdasarkan kriteria prinsip ASEAN Corporate Governance (ASEAN CG).
4. Penarikan Kesimpulan
Proses penarikan kesimpulan menurut Rijali (2018) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menyimpulkan hasil analisis data dari tahap-tahap yang telah dilaksanakan sebelumnya. Peneliti menggunakan kriteria penggolongan predikat yang telah ditentukan untuk menggolongkan sifat kualitas nilai akhir ACGS setiap perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

PT. Lippo Karawaci, Tbk. adalah perusahaan properti yang didirikan pada 15 Oktober 1990, berdasarkan Akta Nomor 233 Tahun 1990 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S. H., Notaris di Jakarta. Modal dasar yang disetorkan oleh Perusahaan adalah sebesar Rp.9.200.000.000. PT. Lippo Karawaci, Tbk. merupakan salah satu perusahaan properti dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki maksud dan tujuan bisnis yaitu secara khusus bergerak dalam sektor properti dan real estat, baik yang dapat dimiliki sendiri ataupun disewa. Hingga tahun 2020, Perusahaan telah

memiliki banyak properti di lebih dari empat puluh kota. Perusahaan juga telah memiliki beberapa properti, antara lain 39 rumah sakit, 56 pusat perbelanjaan dan sepuluh hotel. Kantor Pusat PT. Lippo Karawaci, Tbk. terletak di Menara Matahari Lantai 22, Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 7, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Indonesia, 15810.

Hubungan antar Teori Keagenan dengan Implementasi ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) merupakan salah satu pedoman yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dari penerapan teori keagenan. Beberapa contoh dari dampak negatif yang berpotensi muncul dari implementasi teori keagenan dalam suatu tata kelola perusahaan antara lain adalah adanya konflik kepentingan antar pihak yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan serta adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara pihak prinsipal dan pihak agen. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan. Sebagai sebuah tindak lanjut praktis dari prinsip-prinsip GCG, ACGS memiliki bagian yang tidak bertolak belakang dengan prinsip GCG, dan justru membantu perusahaan semakin mudah dalam menerapkan prinsip GCG, karena ACGS sudah merincikan sedemikian rupa hal-hal apa saja yang harus diterapkan dan diungkapkan oleh perusahaan dalam menjamin kelangsungan tata kelola perusahaan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, ACGS sangat menitikberatkan penerapannya dalam keterbukaan informasi serta membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan, seperti dewan komisaris, direksi, pemegang saham, pemangku kepentingan sampai dengan karyawan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan menerapkan ACGS, maka perusahaan dapat terbantu untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul atas hubungan antara pihak prinsipal dan pihak agen, sehingga tata kelola perusahaan dapat berlangsung dengan baik dalam jangka waktu yang panjang.

Hasil Implementasi dan Rincian Nilai ASEAN Corporate Governance Scorecard pada PT. Lippo Karawaci, Tbk.

TABEL 2. NILAI AKHIR LEVEL 1 (SATU) ACGS PT. LIPPO KARAWACI, TBK.

Bagian	Total Terpenuhi	Bobot (%)	Nilai Akhir
A	16	10	7,6
B	9	10	6,0
C	9	15	10,4
D	27	25	21,1
E	44	40	27,1
Total	105	100	72,2

Sumber: Data Diolah Sendiri (2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kriteria *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) pada PT. Lippo Karawaci, Tbk. menunjukkan bahwa PT. Lippo Karawaci, Tbk. telah mendapatkan predikat TERPERCAYA dalam menerapkan kriteria ACGS dengan perolehan nilai akhir pada level satu sebesar 72,2.

Saran

Saran untuk Penelitian Berikutnya antara lain:

- Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan proses penilaian penerapan ACGS pada PT. Lippo Karawaci, Tbk. dengan menggunakan kriteria level dua ACGS, agar dapat mengetahui lebih lanjut kriteria apa saja yang dapat menambah dan mengurangi nilai akhir PT. Lippo Karawaci, Tbk. dalam menerapkan kriteria ACGS.
- Melakukan penelitian dengan metode serupa dengan penelitian ini dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda dalam sektor yang sama, yaitu perusahaan terbuka dalam sektor properti yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, agar dapat memperoleh perbandingan mengenai hasil penerapan kriteria ACGS antar perusahaan properti yang terbuka di Indonesia.

- Melakukan penelitian dengan menganalisis dokumen dan informasi Perusahaan dari tahun sebelumnya atau setelahnya, agar dapat memperoleh pertimbangan mengenai perkembangan penerapan kriteria ACGS yang telah diterapkan perusahaan setiap tahunnya.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan Penelitian ini adalah Peneliti sudah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan penelitian ini sesuai dengan prosedur ilmiah. Namun, peneliti sadar bahwa penelitian ini tetap memiliki keterbatasan dan kekurangan. Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti tidak menggunakan kriteria yang ada pada *level* dua prosedur penilaian ACGS, yaitu kriteria *bonus* dan *penalty*. Hal ini disebabkan karena dalam tidak ada informasi lebih lanjut mengenai bobot serta rumus perhitungan *level* dua. Hal ini menyebabkan peneliti hanya dapat menganalisis *level* satu, karena bobot dan rumus perhitungan telah diungkapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, H. (2021). *Tujuan MEA Bagi Negara ASEAN Beserta Pilarnya Untuk Pemerataan Ekonomi* dari *website* Liputan6: <https://hot.liputan6.com/read/4611259/tujuan-mea-bagi-negara-asean-beserta-pilarnya-untuk-pemerataan-ekonomi>
- Arifin. (2005). *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*. Dipresentasikan dalam Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar.
- ASEAN Capital Market Forum. (2020). *ASEAN Corporate Governance 2019 Awards*. Diakses dari *website* The ACMF: www.theacmf.org
- Asian Development Bank. (2021). *ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assessments 2019*. Diakses dari *website* Asian Development Bank: www.theacmf.org
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2006). *Studi Penerapan Prinsip-prinsip OECD 2004 dalam Peraturan BAPEPAM Mengenai Corporate Governance*. Diakses dari *website* Academia: <https://www.academia.edu/>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2019*. Diakses dari *website* Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/>
- Bursa Efek Indonesia. (2019). *IDX Fact Book 2019*. Diakses dari *website* Indonesia Stock Exchange: <https://idx.co.id/>
- Deil, S. A. F. (2014). *Enron, Skandal Besar Perusahaan Energi Yang Cekik Investor*. Diakses dari *website* Liputan6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2031867/enron-skandal-besar-perusahaan-energi-yang-cekik-investor>
- Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Faisal, K. (2008). *Kewenangan Komite Nasional Kebijakan Governance Dalam Penerapan Good Corporate Governance Pada Sektor Perbankan (Skripsi tidak dipublikasikan)*. Program Studi Hukum dan Bisnis. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Florenca. (2019). *Pengaruh Corporate Governance dan Political Connections terhadap Tax Agressiveness pada Sektor Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 (Skripsi tidak dipublikasikan)*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Kristen Petra, Surabaya.

- Hamonangan, F. R. & Hermawan, A. A. (2020). Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard: Case Study PT Jakarta Propertindo (Perseroda). *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*. 1(4). 580-601.
- Hamta, F. (2019). *Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Iba, Z. & Bairah, C. (2013). Mengenal Prinsip dan Penerapan Corporate Governance dalam Mendukung Pengungkapan Informasi. *Jurnal Kebangsaan*. 2(3). 17-25.
- Indonesia Institute for Corporate Directorship. *Overview of ASEAN CG Scorecard: Enhancing Corporate Governance (CG) Disclosure Policy and Practice Based on ASEAN CG Scorecard*. Diakses dari *website* Blog Staf Universtas Indonesia: <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/>
- Indonesia, Republik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Indonesia, Republik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Modul Chartered Accountant: Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat*. 2015. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karina, J, & Weli. (2020). Evaluasi Kepatuhan Good Corporate Governance Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard pada Consumer Goods Industry yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Atma Jaya Accounting Research*. 3(1). 114-132.
- Kartikasari, D. (2013). Penerapan Praktis Analisis Fundamental. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. 1(2), 190-198.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Pengarang.
- Kustodian Sentral Efek Indonesia. (2021). *Statistik Pasar Modal Indonesia: Agustus 2021*. Diakses dari *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia: <https://www.ksei.co.id/>
- Muljono, P. (2002). *Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Penelitian*. Disampaikan pada Lokakarya Peningkatan Suasana Akademik Jurusan Ekonomi FIS-UNJ tanggal 5-9 Agustus 2002. Jurusan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.
- Natarysyah, S. (2000). Analisis Pengaruh Beberapa Faktor Fundamental dan Risiko Sistematis Terhadap Harga Saham (Kasus Industri Barang Konsumsi Go-Publik di Pasar Modal Indonesia). *Journal of Indonesian Economy and Business*. 15(3), 294-312.
- National University of Singapore Business School. (2021). *ASEAN Corporate Governance Scorecard: ACGS Conference 2021 on 11 May 2021*. Diakses dari *website* National University of Singapore Business School: <https://bschool.nus.edu.sg/>
- Negara, J. P. (2021). Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. 9(2).
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. 13(2). 177-181.
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*.

- Diakses dari *website* OECD:
<https://www.oecd.org/>
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2021). *Discover the OECD: Better Policies for Better Lives*. Diakses dari *website* OECD:
<https://www.oecd.org/>
- Pahlevi, R. (2021). Analisis Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. 9(2).
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Prabowo, M. S. (2018). Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*. 11(2). 257-270.
- Putra, L. A. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2017* (Skripsi tidak dipublikasikan). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta.
- Putri, R. (2016). *Efektivitas Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di MAN 2 Model Pekanbaru* (Skripsi tidak dipublikasikan). Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Disampaikan pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rahmawati, A. (2017). Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada PT. XYZ. (Tesis tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
- Rahmawati, I., Rikumahu, B., & Dillak, V. J. (2017). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *JAE: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(2). 54-70.
- Rahmawati, S. (2006). *Konflik Keagenan Dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Banda Aceh: Penerbit Syiah Kuala University Press.
- Renny, E. P. (2017). *Pengaruh Tenur, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit: Studi Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia* (Skripsi tidak dipublikasikan). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Indonesia).
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. 17(33). 81-95.
- RSM Indonesia. (2020). *10 Perusahaan Tercatat di Indonesia Masuk Dalam Kategori ASEAN Asset Class*. Diakses dari *website* RSM Indonesia:
<https://www.rsm.global/indonesia/en>
- RSM Indonesia. (2020). *ACGS: Journey to ASEAN Asset Class*. Diakses dari *website* RSM Indonesia:
<https://www.rsm.global/indonesia/en>
- Sarmigi, E. & Luthan, L. (2018). Analisis Implementasi ASEAN Corporate Governance Scorecard Pada PT. Aneka Tambang, Tbk. *E-Journal STIE*

- Sakti Alam Kerinci PROFITA*. 1(1). 26-34.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo
- Shaqila, B. L. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tindakan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. 9(2).
- Simanjuntak, P. (2019). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Biaya Keagenan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia* (Skripsi tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan, Medan.
- Tarigan, L. R., (2016). *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2015* (Skripsi tidak dipublikasikan). Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Wicaksono, T. E. (2020). *Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang* (Skripsi tidak dipublikasikan). STIE PGRI Dewantara Jombang, Jombang.
- Wijaya, A. & Ananta, W. P. (2017). *Hukum Bisnis Properti Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo